

Research Article**Analysis of Accountability and Supervision and Solutions
to Guidance and Counseling Problems****Afifah**

Universitas Negeri Padang

E-mail: afifahhh1009@gmail.com**Neviyarni S**

Universitas Negeri Padang

E-mail: neviyarni@konselor.org**Yarmis Syukur**

Universitas Negeri Padang

E-mail: yarmissyukur@fip.unp.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Journal of Psychology, Counseling and Education.

Received : December 12, 2024

Revised : January 6, 2025

Accepted : January 18, 2025

Available online : February 22, 2025

How to Cite: Afifah, Neviyarni S, & Yarmis Sukur. (2025). Analysis of Accountability and Supervision and Solutions to Guidance and Counseling Problems. Journal Of Psychology, Counseling And Education, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.58355/psy.v3i1.49>**Abstract**

Understand the concept of accountability and supervision in the context of guidance and counseling, as well as to identify the requirements, forms, criteria, supporting factors, obstacles, implications, problems and solutions related to the implementation of accountability and supervision. The research methodology used is the library method, where information is collected from various literary sources such as books, scientific reports and journal articles. Literature research is used to collect relevant information from various sources to support analysis of the concepts of accountability and supervision. The research results show that the concept of accountability and supervision in the context of guidance and counseling includes an understanding of responsibility to be accountable for performance or actions to the authorities. Accountability involves responsibility for performance results and services provided, while supervision involves monitoring and evaluation to ensure that organizational operations follow established procedures and guidelines. The

implementation of accountability and supervision involves supporting and inhibiting elements as well as suggested solutions.

Keywords: Accountability, Supervision, Solutions, Guidance and Counseling.

Analisis Akuntabilitas dan Pengawasan Serta Solusinya Terhadap Permasalahan Bimbingan Konseling

Abstrak

Memahami konsep akuntabilitas dan pengawasan dalam konteks bimbingan dan konseling, serta untuk mengidentifikasi syarat, bentuk, kriteria, faktor pendukung, penghambat, implikasi, masalah, dan solusi terkait pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, laporan ilmiah, dan artikel jurnal. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menghimpun informasi yang relevan dari berbagai sumber guna mendukung analisis konsep akuntabilitas dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas dan pengawasan dalam konteks bimbingan dan konseling mencakup pemahaman tentang tanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan atas kinerja atau tindakan kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban atas hasil kinerja dan layanan yang disediakan, sedangkan pengawasan melibatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa operasi organisasi mengikuti prosedur dan pedoman yang ditetapkan. Penerapan akuntabilitas dan pengawasan melibatkan unsur pendukung dan penghambat serta solusi yang disarankan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan, Solusi, Bimbingan dan Konseling.

PENDAHULUAN

Konsep Akuntabilitas adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Gibson Mitchell, akuntabilitas adalah keharusan memberikan tanggung jawab kepada seseorang atas sesuatu dan memiliki dampak yang dapat diprediksi terhadap kinerja yang diinginkan. Dalam konteks bimbingan dan konseling, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban untuk menjawab kinerja kepada mereka yang berwenang atau berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan konsep pengawasan dalam konteks BK, hal ini berarti menjaga pengawasan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana organisasi dan jika ditemukan penyimpangan, diperbaiki dan diperbaiki. Tanggung jawab utama pengawas BK adalah memimpin dengan memberi contoh, memberi petunjuk, membimbing staf sekolah lainnya.

Stakeholder dalam BK meliputi pemerintah, masyarakat, pengajar, konselor, orang tua, kepala sekolah dan siswa disekolah. Masing-masing mempunyai tujuan dan tugas yang berbeda dalam penyelenggaraan program BK. Syarat Akuntabilitas yaitu Kemampuan menjawab dan konsekuensi merupakan dua aspek utama dari akuntabilitas. Ini melibatkan tanggung jawab dalam menjawab pertanyaan terkait

praktik layanan BK dan memberikan hak pada klien untuk mengetahui kebijakan dan tindak lanjut layanan dan pengawasan serta rencana yang jelas, kerangka organisasi yang jelas dan objektivitas diperlukan untuk pengawasan. Kompetensi tertentu juga diperlukan untuk pengawasan antara lain kompetensi sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, penilaian pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Faktor pendukung meliputi koordinasi yang sangat baik, diskusi program yang tepa, kepemimpinan yang teladan dan rumusan standar kerja yang jelas. Faktor penghambat termasuk kesadaran yang rendah tentang akuntabilitas, kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas, dan faktor budaya. Melaksanakan akuntabilitas memungkinkan konselor memilih strategi konseling berdasarkan efektivitas, mendapatkan masukan mengenai hasil pekerjaan mereka dan memperkuat kolaborasi dengan para ahli lainnya. Konselor dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi klien yang kebutuhannya belum terpenuhi untuk membuat perbaikan cepat tentang tugas sehari-hari.

Masalah dalam pelaksanaan akuntabilitas BK meliputi kekurangan perencanaan waktu, pertentangan antara pengukuran dan tindakan konselor, dan ketakutan akan hasil assessment yang buruk. Solusi termasuk meningkatkan standar kinerja sumber daya manusia melalui peningkatan pengajaran dan pelatihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan, yang sering disebut sebagai studi kepustakaan. Metode ini merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan materi terkait dengan topik atau permasalahan penelitian dari berbagai sumber baik cetak maupun digital, seperti buku, ensiklopedia, karya ilmiah, tesis, disertasi dan sumber lainnya.

Kajian literatur merupakan suatu evaluasi yang menelusuri literatur yang mendukung isu khusus dalam penelitian yang sedang berlangsung. Kajian ini memberikan kontribusi penting bagi peneliti, termasuk memberikan gambaran terkait masalah penelitian, menyediakan dukungan teoritis dan konseptual, serta menjadi bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian (Creswell & Creswell J. D, 2017). Selain itu, kajian literatur dapat membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian. Meskipun kajian literatur dapat mencakup deskripsi penuh, namun tidak hanya sekadar merangkum, melainkan juga memberikan penilaian dan menunjukkan hubungan antara berbagai bahan, sehingga menyoroti tema kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akuntabilitas dan Pengawasan

1. Konsep Akuntabilitas

Munandir (1996: 299), Gibson dan Mitchell mendefinisikan akuntabilitas sebagai bertanggung jawab atas pertanyang yang diberikan kepada seseorang dengan jelas menegaskan harapan akan hasil yang diinginkan dari kinerja mereka, sereta menyatakan kesadara akan tanggung jawab yang melekat pada tindakan tersebut. Akuntabilitas disebut juga dengan kinerja (Prayitno 1987)

akuntabilitas telah lama menjadi isu sejak layanan bimbingan dan konseling pertama kali dilembagakan disekolah.

Akuntabilitas diartikan sebagai tugas mengkomunikasikan akuntabilitas untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan kinerja badan hukum/pimpinan kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang meminta informasi/pertanggungjawaban (Bastian, 2010). Akuntabilitas pelayanan BK yang disebutkan disini tidak terjadi secara sembarangan, tetapi memenuhi persyaratan berbagai standar profesi dibidang pembinaan dan konsultasi dan konsultasi. Salah satu aspek pekerjaan konselor profesional yang berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan kehidupan sehari-hari yang efisien (KES) dan kehidupan sehari – hari yang terganggu (KES- T) yang sepenuhnya menangani interupsi peserta didik. Artinya bagaimana membimbing dan berkonsultasi dengan guru/konselor untuk mengelola termasuk perencanaan, pengorganisasian, inisiasi dan pengendalian langkah – langkah pelayanan bimbingan dan konsultasi yang kesemuanya perlu diatur secara tertib. Evaluasi yang berfokus pada RPLBK atau RPLKI, LAPERPROG, dan AKURS semuanya telah dievaluasi secara cermat agar hasilnya dapat dinilai baik secara institusional maupun ilmiah dengan tekun dan konsisten.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada pembagian tugas administratif kedalam tingkatan – tingkatan dalam suatu organisasi dengan tujuan menyelesaikan tugas disetiap divisi. Betapapun kecilnya, setiap unit dalam suatu organisasi bertanggung jawab atas seluruh tugas yang diselesaikan didalamnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas- tugas tertentu dan harus bertanggung jawab kepada pemberi tugas untuk penyelesaiannya.

2. Konsep Pengawasan

Pengawas sekolah adalah otoritas fungsional yang ditunjuk untuk mengawasi aspek teknis dari sejumlah kurikulum sekolah tertentu. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan mencontohkan perilaku melalui pekerjaannya (Purba, S., 2018). Pengawas sekolah berusaha memastikan bahwa guru dan anggota staf lain disekolah dibawah pengawasannya melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih perhatian dan mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan menyampaikan arahan. Pengawasan sekolah berupaya memberikan arahan agar guru dan staf lain disekolah diawasinya. Memberi contoh adalah ketika pengawas sekolah mengambil peran langsung sebagai guru untuk mengajar materi pendidikan tertentu dalam proses pendidikan dapat dijadikan contoh. Tujuannya agar guru yang disupervisi dapat mempraktekkan model yang dicontohkan pula. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa tanggung jawab utama supervisor antara lain bertindak sebagai inspektur, pengamat, pelapor, coordinator dan pemimpin (Surya Dharma, 2006).

Apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan, maka proses pengawasan terhadap berbagai hal untuk memastikan terselesaikannya seluruh operasional organisasi dapat disebut dengan pengawasan yang dilaksanakan sesuai jadwal dan sekaligus sebagai kegiatan perbaikan dan peningkatan.

Dalam Depdiknas (2009) penjelasan mengenai kegiatan supervisi meliputi menyusun program supervisi satuan pendidikan, melaksanakan pedoman akademik dan administrasi, memperlihatkan delapan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan penilaian administrative dan akademik dan melaporkan pelaksanaan program supervisi.

Dalam BK pengawasan merupakan suatu upaya metodis untuk menetapkan standar kinerja guna membangun sistem umpan balik informasi, mengevaluasi kinerja BK yang sebenarnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, menemukan inkonsistensi dalam pemberian layanan BK serta menerapkan tindakan perbaikan yang tepat untuk menjamin bahwa semua tujuan pemberian layanan dapat tercapai dan terpenuhi.

Stakeholder (Pelanggan) BK

Menurut Neviyarni (2023) istilah stakeholder telah digunakan oleh banyak pihak dan sangat populer dalam hal berbagi pengetahuan atau latar belakang. Misalnya dibidang sosiologi, manajemen sumber daya alam, manajemen bisnis dan Ilmu komunikasi. Istilah stakeholder banyak digunakan oleh lembaga public dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi. Singkatnya, stakeholder biasanya dikatakan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu rencana atau isu serta lintas partisipan.

Menurut Wikipedia, stakeholder adalah suatu kelompok, organisasi atau individu yang dapat memberikan dampak atau mempengaruhi suatu kegiatan disebut sebagai stakeholder kepentingan. Para pihak yaitu berupa lintas aktor atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu strategi atau isu disebut sebagai pemangku kepentingan. Definisi ini sangat memperjelas apa yang dimaksud ketika topik pendidikan dibahas, khususnya bidang bimbingan dan konseling bagi para pemangku kepentingan berupa:

1. Peserta didik
2. Wali
3. Kepala Sekolah
4. Guru
5. Konselor
6. Guru dan staf
7. administrasi
8. komunitas

Setiap elemen stakeholders kepentingan disebutkan diatas semuanya terlibat serta terhubung langsung dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Meskipun tugas dan fungsi utama masing- masing bagian ini berbeda-beda, namun semuanya bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan yang kohesif. Hasil yang dihargai oleh konselor sekolah harus penting bagi pemangku kepentingan yang mereka layani, atau kontituen yang mereka upayakan untuk membangun dan menjunjung tinggi profesionalisme dan kepercayaan public (Perusse & Goodnough, 2004). Sesuai dengan temuan Dahir dan Stone (2009), mengumpulkan informasi dan memperbarui pemangku kepentingan merupakan aspek penting dari tanggung jawab seorang konselor.

Syarat Akuntabilitas dan Pengawasan

1. Syarat Akuntabilitas

Kualitas akuntabilitas berikut ini diperlukan untuk menjamin berkembangnya pengawasan dan akuntabilitas yang efektif yaitu:

- a. Kemampuan menjawab yaitu (kata yang berasal dari tanggung jawab) terhadap persyaratan bahwa konselor, guru konseling, dan guru bimbingan menanggapi pertanyaan tentang penggunaan wewenang mereka dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.
- b. Konsekuensi yaitu kebijakan yang diambil oleh pihak yang dititipi, konselor, berkaitan dengan program layanan, teknik penilaian, penggunaan data dan tindak lanjut layanan yang diberikan tunduk pada akses publik dan klien. Konsep utama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat ada dua hal yang telah disebutkan diatas..

Menurut Yusuf (2002), menjelaskan bahwa manajemen dapat dikatakan akuntabel jika kegiatan pelaksanaannya telah meliputi hal sebagai berikut.

- a. Menetapkan tujuan yang sesuai.
- b. Membuat standar yang diperlukan untuk memenuhi tujuan.
- c. Mendorong praktik penggunaan konvensional.
- d. Menciptakan standar operasi dan organisasi dengan cara yang praktis, terjangkau dan efisien.

2. Syarat Pengawasan

- a. Perencanaan diperlukan untuk pengawasan, pengawasan bimbingan dan konseling membuat rencana supervisi yang meliputi rencana supervisi akademik, program supervisi semester dan program supervisi tahunan (RKA). Pengawas harus menggunakan rencana yang dikembangkan sebagai acuan tindakannya.
- b. Struktur organisasi harus jelas untuk melakukan pengawasan, meskipun pemantauan bertujuan untuk mengukur setiap tindakan dan menjamin bahwa tindakan tersebut berjalan sesuai rencana, kita juga perlu mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas setiap penyimpangan yang terjadi didalam perusahaan. Selain itu, kita harus menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki.
- c. Pengawasan dilakukan secara tidak memihak. Pengawasan harus dilakukan secara obyektif, dengan tujuan umum untuk mengenali jenis-jenis penyimpangan yang terjadi. Apabila yang melakukan pengawasan adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang dibidangnya maka bisa dikatakan sudah dilakukan secara obyektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menguraikan tentang kualifikasi yang harus dimiliki seorang pengawas dan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 standar mengatur pengawas sekolah/madrasah diantaranya adalah:

- a. kompetensi dalam kepribadian
- b. kompetensi untuk mengawasi manajerial
- c. kompetensi dalam supervisi akademik
- d. Kompetensi dalam evaluasi Pendidikan

- e. kompetensi dalam penelitian dan pengembangan
- f. kompetensi dalam sosial.

Menurut Neviyarni (2023) memastikan terwujudnya akuntabilitas dan pengawasan yang tepat, system akuntabilitas itu sendiri harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kemampuan menjawab bahwa istilah yang berasal dari tanggung jawab terkait dengan keharusan konselor/ untuk secara teratur menjawab setiap pertanyaan terkait bagaimana mereka menggunakan kewenangannya untuk melakukan praktik layanan BK yang komprehensif.
- b. Klien menanggung konsekuensinya yaitu berhak memahami kebijakan yang telah diterapkan olehnya (pelanggan yang dipercaya oleh (konselor) dalam hal rencana layanan, metode evaluasi, evaluasi penggunaan data dan tindak lanjutnya. Kedua hal inilah yang menjadi gagasan utama untuk membangun kepercayaan publik.

Astramovich & Coker (2007) menjelaskan bahwa guru/ konselor bimbingan dan konseling mempunyai kualifikasi untuk membuat dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, maka salah satu syarat untuk membangun akuntabilitas adalah evaluasi program layanan bimbingan dan konseling melalui evaluasi. Untuk membantu konselor meningkatkan prosedur bimbingan dan konseling disekolah, akuntabilitas juga merupakan sarana untuk mendidik dan memberi informasi kepada mereka tentang kemanjuran layanan konseling.

Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Menurut Yusuf (2002) berpendapat bahwa dalam bimbingan dan konseling terdapat berbagai jenis akuntabilitas seperti akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas manajemen.

Akuntabilitas hasil tindakan BK anak erat kaitannya dengan rencana dan strategi yang telah dibuat hal ini juga akan menjadi gambaran sistem akuntabilitas protocol terkait pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas manajemen yang selanjutnya dipisahkan menjadi hutang, real estate, personalia dan administrasi.

Selain itu, Yusuf (2002) juga memaparkan sistem akuntabilitas dapat dilihat dari sisi baik dari akuntabilitas internal maupun eksternal, disebut juga akuntabilitas, dapat dilihat dari sudut pandang berikut:

- a. Akuntabilitas internal menunjukkan bahwa semua individu bertanggung jawab kepada orang yang mengawasi dan mengelola pekerjaan mereka disemua tingkatan. Guru BK/ konselor disekolah.
- b. Akuntabilitas eksternal yaitu akuntabilitas dikomunikasikan kepada departemen terkait diluar organisasi. Misalnya, bertanggung jawab kepada masyarakat yang menggunakan jasa konsultasi.

Menurut Romzek dan Dumnick, 1987 (dalam Kurniawan, 2007) jenis akuntabilitas lainnya terdiri dari 4 kategori yaitu:

- a. Akuntabilitas birokrasi dilakukan melalui hierarki organisasi.
- b. Akuntabilitas hukum formal yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Berbagai pihak yang terlibat dalam akuntabilitas politik informal
- d. Pemangku kepentingan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya.
- e. Akuntabilitas Professional informal anggotanya sesuai dengan aturan organisasi profesi.

Menurut Sink (2009), bentuk-bentuk akuntabilitas dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang dapat ditawarkan oleh guru bimbingan dan konseling disekolah. cara guru bimbingan dan konseling menjalankan tugas tradisionalnya disekolah yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dapat berguna dalam membujuk sekolah untuk menunukkan kemampuan fakultas bimbingan dan konselingnya. Ia menemukan bahwa pembuktian akuntabilitas membantu meyakinkan para pendidik, orang tua, kepala sekolah dan siswa bahwa layanan luar biasa yang diberikan oleh karya klasik akan terus bermanfaat. Konselor harus menawarkan informasi mengenai akuntabilitas. (White, 2007).

Kriteria Akuntabilitas

Kriteria adalah ukuran yang berfungsi sebagai landasan untuk menilai atau memutuskan sesuatu. Tujuh persyaratan harus dipenuhi agar sistem akuntabilitas dapat memberikan hasil yang diharapkan. Dipenuhi (Krumboltz, dalam Gibson & Mitchell 1981) sebagai berikut:

1. Semua pihak harus menyepakati tujuan umum konseling untuk mengidentifikasi wilayah tanggung jawab konselor.
2. Prestasi konselor harus diartikulasikan dengan kata – kata perubahan perilaku yang dialami dan diperhatikan klien adalah yang hal yang sangat penting.
3. Upaya guru BK/ konselor hendaknya dilaporkan sebagai pengeluaran dan bukan keberhasilan.
4. Sistem akuntabilitas harus diterapkan untuk mendorong pertumbuhan profesional dan pelayanan prima, bukan untuk menyalahkan atau menghukum pekerjaan dibawah standar.
5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
6. Perancangan sistem akuntabilitas perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
7. Perlu dilakukan penilaian dan penyesuaian terhadap sistem akuntabilitas itu sendiri.

Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang memuat 14 indikator kriteria penilaian kinerja organisasi dan lembaga merupakan salah satu instrument yang dikembangkan pemerintah. Untuk mengukur kinerja pelayanan public secara eksternal, indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu seberapa mudah masyarakat mengakses berbagai tahapan pelayanan ditinjau dari seberapa mudah alur pelayanannya.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan administratif dan teknologi khususnya untuk setiap jenis pelayanan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pelayanan.

3. Kejelasan profesional pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan layanan (posisi, peran, wewenang, kekuasaan, peran, wewenang dan tugas).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan atau seberapa serius mereka menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan menjaga jam kerja regular sesuai dengan undang – undang terkait.
5. Akuntabilitas petugas pelayanan, yaitu atas kewenangan dan tugasnya dalam mengawasi dan melaksanakan pelayanan.
6. Kemampuan kapasitas karyawan layanan atau tingkat keahlian dan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas bagi masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan atau waktu sasaran untuk menyelesaikan suatu tugas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh unit penyedia layanan.
8. Kesetaraan dalam pemberian layanan yaitu pemberian layanan kepada semua klien tanpa membedakan – bedakan berdasarkan status atau keanggotaannya dalam kelompok tertentu.
9. Keramahan dan kesopanan petugas yaitu bagaimana bersikap dan melayani masyarakat dengan baik dan ramah tamah serta saling menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan yaitu kesepakatan antara jumlah yang dibayarkan dan biaya yang telah ditentukan sebelumnya.
12. Kepastian jadwal pelayanan yaitu penerapan jam pelayanan sesuai pedoman yang ditentukan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu keadaan prasarana dan sarana pelayanan yang hegenis, rapid an tertata dengan baik sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.
14. Keamanan pelayanan, yaitu memastikan fasilitas atau lingkungan sekitar unit penyedia layanan mempunyai tingkat keamanan yang cukup untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan mekipun ada risiko dalam pelaksanaannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan BK

Penerapan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling sangat bergantung pada variabel-variabel luar yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaannya. A. Muri Yusuf menyatakan (dalam Amirah Diniaty, 2012) bahwa elemen-elemen tersebut terdiri dari:

1. Faktor Pendukung
 - a. Kepemimpinan yang memberikan contoh keunggulan.
 - b. Mendiskusikan program-program yang yang perlu dilakukan secara tepat dan menyeluruh. Untuk memastiikan bahwa tujuan yang ditetapkan.
 - 1) Menjalin komunikasi yang efektif antar unit yang terhubung
 - 2) Menciptakan persyaratan kerja yang tepat
 - 3). Menjelaskan arti dan tujuan akuntabilitas kepada semua pihak yang terlibat.
 - c. Faktor yang menghambat, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kegagalan penerapan akuntabilitas adalah:

- 1) penolakan untuk menegakkan akuntabilitas
- 2) penolakan untuk menegakkan akuntabilitas.
- 3) pengurangan nilai- nilai yang berlaku umum.
- 4) Aspek budaya.
- 5) Pejabat dan aparat yang berkualitas rendah.
- 6) Krisis dilingkungan.
- 7) Celah hukum mengenai tanggung jawab.
- 8) Ledakan teknologi kualitas hidup yang rendah.

Implikasi Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengawasan

Gibson & Mitchell (1981) menguraikan bagaimana konselor akan mampu melakukan hal berikut berkat akuntabilitas:

1. Meminta masukan terhadap pekerjaannya.
2. Teknik konseling dapat dipilih berdasarkan rekam jejak keberhasilannya.
3. Menentukan kebutuhan klien mana yang belum selesai.
4. Buat protocol yang jelas untuk kegiatan sehari-hari.
5. Adakan pertemuan curah pendapat dengan anggota staf untuk menemukan solusi dan meningkatkan pencapaian tujuan. permasalahan baru. Selain itu, menurut Krumboltz (1994), kapasitas tanggung jawab memastikan bahwa konselor akan berupaya menciptakan kerangka akuntabilitas yang menguntungkan mereka secara pribadi.

Selain itu Gibson & Mitchell, 1981 meunjukkan bahwa konselor belajar bagaimana membantu klien dengan lebih sukses ketika mereka menerapkan tanggung jawab dan efektif.

1. Banyak permasalahan yang diselesaikan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang menimbulkan rasa syukur dari penerima layanan.
2. Bantuan keuangan meningkat.
3. Peningkatan kolaborasi dengan spesialis lainnya.
4. Status profesional yang diakui.
5. Adanya insentif yang lebih besar dan fokus yang konstan pada target perbaikan program dan implementasi dalam hal kepuasan layanan.

Masalah dan Solusi

a. Masalah

Schmidt, J. J. (2003) mengemukakan bahwa akar permasalahan akuntabilitas adalah keengganan sebagian konselor dalam mendefinisikan akuntabilitas dengan alasan sebagai berikut :

1. Mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk menilai program yang telah mereka rencanakan.
2. Terdapat konflik antara apa yang seharusnya dilakukan konselor dan bagaimana mengukurnya.
3. Mereka tidak akan perbedaan antara akuntabilitas dan penelitian.
4. Mereka belum sepenuhnya menghargai manfaat dari layanan konseling yang ditawarkan kepada siswa karena mereka belum menetapkan akuntabilitas pekerja konseling kepada atasan mereka.

5. Masyarakat takut terhadap hasil (negative) penilaian konselor.

b. Solusi

Berhubung dengan permasalahan utama adalah sumber daya manusia (bimbingan dan konseling) maka solusi yang diusulkan juga berfokus pada peningkatan kualitas bimbingan dan konseling yang diberikan oleh sumber daya manusia melalui program pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional hal ini juga sesuai dengan temuan Schmidt, J. J. (2003) yang mengatakan bahwa berikut adalah tujuan pelatihan terkait evaluasi akuntabilitas:

1. Membantu konselor dalam mengumpulkan informasi yang mungkin berguna ketika menyelenggarakan pengembangan profesional.
2. Membantu konselor dalam menyusun laporan yang akurat dengan nilai sekolah yang adil.
3. Menetapkan persyaratan validitas dan kredibilitas untuk pekerjaan disekolah sehingga konselor dapat berpartisipasi dalam penelitian.
4. Memberikan izin kepada konselor untuk melakukan penelitian akan menjadi tolak ukur bagi pekerjaan mereka disekolah (kredibilitas).

KESIMPULAN

Paparan dari deskripsi akuntabilitas dan pengawasan bimbingan konseling disimpulkan sebagai berikut. konsep akuntabilitas dan pengawasan dalam bimbingan dan konseling telah diperinci dengan jelas. Akuntabilitas berikut ini adalah kesimpulan mengenai gagasan akuntabilitas dan pengawasan bimbingan konseling, dengan mengacu pada standar profesi yang telah ditetapkan. Pengawasan, di sisi lain, adalah proses monitoring yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi terlaksana sesuai dengan rencana dan untuk memperbaiki penyimpangan jika ditemukan. Stakeholder dalam konteks bimbingan dan konseling termasuk masyarakat, pemerintah, pengajar, orang tua, kepala sekolah, konselor dan anak- anak. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Syarat-syarat untuk mencapai akuntabilitas dan pengawasan yang baik telah diuraikan, termasuk kemampuan menjawab dan konsekuensi yang jelas. Bentuk-bentuk akuntabilitas meliputi akuntabilitas program dan manajemen, dengan penerapan akuntabilitas internal dan eksternal di dalam dan di luar organisasi. Implikasi pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan mencakup kemampuan untuk mendapatkan umpan balik, memilih metode konseling berdasarkan keberhasilan, dan meningkatkan dukungan keuangan serta hubungan kerja dengan profesional lainnya. Meskipun ada tantangan seperti rendahnya kesadaran dan kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas, solusinya adalah fokus pada peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia melalui pelatihan profesional serta pendidikan tambahan hal itu. akan membantu meningkatkan kesadaran akan manfaat pelayanan yang diberikan dan memperbaiki pelaksanaan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Astramovich, R. L. & Coker, J. K. (2007). The Accountability Bridge Model for Counselors. *Journal of Counseling and Development*, 85, 162-172

- Bastian, Indra, (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Diniaty, A. (2012). Evaluasi Bimbingan Konseling. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Depdiknas. (2009). Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Dahir C., & Stone C. (2003). Assessment of school counselor needs for professional development survey (ASCNPD). Unpublished survey.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (1981). Introduction to Counseling and Guidance (2nd ed). New York: Mc Millan Publishing.
- Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Kurniawan Teguh. 2007. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan. Power Point Persentation. Yogyakarta: UGM.
- Neviarni. (2023). Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta : Kencana.
- Perusse, R., & Goodnough, G. E. (Eds.). (2004). Leadership, Advocacy, And Direct Service Strategies For Professional School Counselors. Pacific Grove, CA: Thomson Learning/Brooks/Cole.
- Purba, S. (2018). Profesionalisme dan Kompetensi Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Dan Kinerja Sekolah. GENERASI KAMPUS, 7(2).
- Schmidt, J. J. (2003). Counseling in Schools: Essential services and Comprehensive Programs (4th ed). Boston, MA.: Allyn & Bacon.
- Surya Dharma. (2006). Kepemimpinan Pengawas Sekolah: Mengembangkan Budaya Tanggung Jawab. Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan. Vol. 1, No. 2-Agustus, hal. 9.jn.
- Sink, Christopher. 2009. School Counselor as Accountability Leaders: Another Call for Action. Profesional School Counseling. December. vol.13, 2.
- White, France A. 2007. The Profesional School Counselor's Chalange: Accountability. Journal of Profesional counseling, Practice, Theory, and Research. Spring. Vol. 35, 6.
- Yusuf, A. Muri. (2002). Seminar Sehari Akuntabilitas Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Padang: Jurusan BK, FIP UNP.